

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Kejati Geledah Dinas PUPR, Proyek Jalan Cisinga Diduga Dikorupsi
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Tasikmalaya
Sumber / Hal	: Tribun Jabar/Hal.10
Edisi	: Selasa, 13 November 2018

Kejati Geledah Dinas PUPR

■ Proyek Jalan Cisinga Diduga Dikorupsi

“...ada beberapa kerusakan yang sudah terjadi padahal kondisi jalan atau jembatan itu baru.”

YANWAR RHEZA
Kasi Penyidikan Kejati Jabar

TASIKMALAYA, TRIBUN - Jajaran penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar menggeledah sejumlah ruangan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya, Senin (12/11). Penggeledahan berkaitan dengan penanganan Kejati terhadap proyek jalan tembus Ciawi-Singaparna (Cisinga).

Sejumlah penyidik Kejati langsung menggeledah setelah petugas Kejari Tasikmalaya memberitahu kegiatan tersebut kepada pejabat Dinas PUPR. Sejumlah pejabat dan staf tampak sibuk dengan wajah tegang selama proses penggeledahan.

“Kami tidak tahu sebelumnya bakal ada penggeledahan dari Kejati. Kasusnya apa juga tidak tahu. Tapi katanya soal pembangunan jalan Cisinga,” kata seorang staf yang enggan disebutkan namanya di kantor



ISTIMEWA

PENGELEDAHAN - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar menggeledah sejumlah tempat di Kabupaten Tasikmalaya, antara lain di kantor Dinas PUPR Pemkab Tasikmalaya, kediaman pria berinisial Er, dan kantor PT PGA, Senin (12/11).

PUPR, Jalan Mangunreja.

Ia mengatakan ruangan yang digeledah adalah bendahara dan kepala dinas. Penggeledahan itu dikawal polisi bersenjata. Sejumlah penyidik Kejati sibuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Lebih dari satu jam menggeledah, petugas akhirnya membawa dokumen-dokumen dalam dua koper dan empat tas yang langsung dimasukkan ke dua mobil.

Kasi Penyidikan Kejati Jabar, Yanwar Rheza, mengatakan penggeledahan dilakukan terkait dugaan tindak pidana

korupsi pembangunan jalan dan jembatan Cisinga (Ciawi-Singaparna) tahun anggaran 2017, dengan nilai proyek Rp 25 Miliar.

“Berdasarkan hasil penyidikan, mereka melakukan mark up dan disubkontrakan pekerjaannya. Nanti akan kami coba gali lagi terhadap dugaan-dugaan yang selama ini sudah kami dapatkan,” kata Yanwar.

Diakuinya, pemeriksaan terhadap proyek Cisinga berawal dari laporan masyarakat pada awal bulan Oktober 2018. “Kami sudah mengecek

dengan tenaga ahli jadi kami mendapatkan ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi pengerjaannya, ada beberapa kerusakan yang sudah terjadi padahal kondisi jalan atau jembatan itu baru,” kata Yanwar.

Kejati sudah memeriksa sejumlah pejabat dinas PUPR dan tiga orang rekanan dalam proyek pembuatan jalur penghubung Ciawi dan Singaparna tersebut.

“Selain di sini, kami melakukan pemeriksaan di Kota Tasikmalaya, yakni kantor rekanan dan rumah rekanan. Tiga rekanan sudah kami periksa, di antaranya Er dan D, dan dari Pemkab sejumlah pejabat PUPR,” kata Yanwar.

Pembangunan jalan Cisinga sepanjang 23 km yang mulai dirintis tahun 2003 hingga kini sudah menghabiskan anggaran lebih dari Rp 100 miliar dan masih belum rampung. Jalan Cisinga akan memudahkan warga di wilayah utara Kabupaten Tasikmalaya menuju Singaparna, ibu kota kabupaten. Selama ini mesti menempuh jalur melewati Kota Tasikmalaya dengan jarak sekitar 45 km. (firman suryaman/isep heri)